



Gorontalo Development Review

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev>

Vol 08, No 01, Tahun 2025

P-ISSN : 2614-5170, E- ISSN :2615-1375

Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022

Dampak Penetapan PKN Surakarta dan Sekitarnya terhadap Kawasan Pengembangan Subosukawonosraten *The Impact of the Determination of PKN Surakarta and its Surroundings on the Subosukawonosraten Development Area*

Aditya Muhammad Mudzakir¹, Fera Indriani², Muhammad Daiyan Ramadhan³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung/Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat/Indonesia

Email: admuzakir@gmail.com¹, indrianifera@gmail.com², mdaiyanramadhan@gmail.com³

Article info

Article history:

Received; 22-08-2024

Revised; 11-11-2024

Accepted; 24-11-2024

Abstract. *This study combines growth center theory, basic sector concept, and shift-share analysis to evaluate the impact of the establishment of the National Activity Center (PKN) of Surakarta and its surroundings on the Subosukawonosraten Development Area. The results show that the policy of determining the national activity center in the city area tends to increase economic growth, however, the hierarchical structure of the national urban system must be considered. The application of Functional Urban Area (FUA) emerges as a solution to support economic growth and sustainability, with infrastructure being the key driver. The analysis of basic economic sectors shows that the policy of establishing PKN Surakarta affects the growth of the industrial sector, especially in the area around Subosukawonosraten. Surakarta City becomes the center of service sector activities, while the surrounding areas develop in the industrial sector. The result also differentiates the development of economic base between the areas designated as Regional City Center (PKW) and Local City Center (PKL).*

Abstrak. Penelitian ini memadukan teori pusat pertumbuhan, konsep sektor basis, dan analisis shift-share untuk mengevaluasi dampak penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Surakarta dan sekitarnya terhadap Kawasan Pengembangan Subosukawonosraten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penentuan pusat kegiatan nasional di wilayah kota cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun demikian, struktur hierarki sistem perkotaan nasional harus diperhatikan. Penerapan Functional Urban Area (FUA) muncul sebagai solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, dengan infrastruktur menjadi

kunci penggerak. Analisis sektor ekonomi basis menunjukkan bahwa kebijakan penetapan PKN Surakarta memengaruhi pertumbuhan sektor industri, terutama di wilayah sekitar Subosukawonosraten. Kota Surakarta menjadi pusat kegiatan sektor jasa, sementara wilayah sekitarnya berkembang di sektor industri. Hasil penelitian juga membedakan perkembangan ekonomi basis antara wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kota Wilayah (PKW) dan Pusat Kota Lokal (PKL).

Keywords:

*Pusat Pertumbuhan;
Kawasan
Subosukawonosraten;
Sistem Perkotaan
Nasional;*

Corresponden author:

Email: admuzakir@gmail.com

Pendahuluan

Dalam kajian teoritis, perkembangan dan pertumbuhan wilayah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya peran kebijakan nasional (de Almeida et al., 2024; Guo et al., 2025), globalisasi (Shaban, 2023); aktivitas industri, transportasi dan teknologi (Zhao et al., 2024), serta keunggulan sumber daya lokal atau sektor basis (Setyaningrum & Hartono, 2011) maupun keterkaitan antar sektor ekonominya (Giannakis et al., 2024). Lebih jauh, Liu et al. (2024) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan wilayah ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi memiliki korelasi atau keterkaitan secara spasial. Secara spesifik erat kaitannya dengan keberadaan pusat pertumbuhan dan aglomerasi wilayah.

Pusat pertumbuhan merupakan area strategis yang mendorong pengembangan wilayah melalui peran sentralnya dalam ekonomi. Secara struktur, pusat pertumbuhan cenderung berkumpul dalam pola geometris yang teratur (Tiebout, 1956). Konsep ini dikenal sebagai "*Central Place Theory*" yang menekankan hubungan antara pusat pertumbuhan dan distribusi pelayanan ekonomi di sekitarnya. pusat pertumbuhan membentuk hierarki yang menyediakan layanan ekonomi kompleks dan khusus, berfungsi sebagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi yang mendorong keseimbangan serta redistribusi sumber daya dan pekerjaan.

Perkotaan, sebagai bentuk pusat pertumbuhan, mengalami transformasi signifikan dengan aglomerasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan melalui efek spillover Liu et al. (2024). Dalam beberapa kasus, negara juga terlibat dalam kebijakan integrasi spasial ini. Sebagaimana Guo et al. (2025) menjelaskan bahwa integrasi regional yang dipimpin pemerintah turut memfasilitasi pembagian fungsi industri dan perkotaan, merangsang pertumbuhan ekonomi regional.

Kota Surakarta adalah contoh pusat pertumbuhan di Indonesia dengan fungsi pelayanan wilayah sekitarnya di Jawa Tengah. Dengan luas 44,03 km² dan populasi 522.728 jiwa (2022), Surakarta berperan sebagai simpul transportasi dan penggerak ekonomi. Berdasarkan PP 13/2017 tentang RTRW Nasional, Surakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diharapkan melayani wilayah sekitarnya, termasuk WP Subosukawonosraten (Wilayah Pengembangan Surakarta,

Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/2019 tentang RTRW. Hal ini mengindikasikan bahwa Surakarta, tidak hanya dipacu untuk perkembangan wilayahnya sendiri, tetapi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, terutama WP Subosukawonosraten. Ditarik dalam konteks keruangan, PKN dan WP ini merupakan bentuk penstrukturan spasial untuk tujuan tertentu. (Li et al., 2024) menjelaskan bahwa struktur spasial menawarkan wawasan bagi wilayah lain untuk terlibat dalam tata kelola makro-spasial.

Penetapan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diharapkan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah pengembangan (WP) Subosukawonosraten, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Surakarta berperan strategis dalam merumuskan dan menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Status sebagai PKN membuka peluang pengembangan wilayah sekitar, memanfaatkan pusat pertumbuhan, ekosistem bisnis matang, kehadiran perusahaan multinasional, dan konektivitas global (Athukorala & Narayanan, 2018). Lebih jauh Li et al. (2025) menekankan pentingnya tata kelola regional dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan membahas dampak konkret penetapan PKN Surakarta terhadap pertumbuhan ekonomi WP Subosukawonosraten, serta keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi wilayah di Indonesia. Analisis akan menyoroti sejauh mana kebijakan dan inisiatif pembangunan PKN merangsang sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan tidak hanya pada wilayah inti (PKN Surakarta) tetapi juga kota sekunder (WP Subosukawonosraten) untuk pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan (Du et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data sektoral setiap wilayah di WP Subosukawonosraten dengan rentang tahun 2010-2022 yang disesuaikan pada setiap analisis. Sementara itu analisis utama pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, terdiri dari : 1) analisis pusat pertumbuhan; 2) analisis *location quotient* (LQ); dan 3) analisis *shiftshare*. Untuk melihat sejauhmana dampak dari PKN Surakarta terhadap WP Subosukawonosraten, maka akan digunakan perbandingan hasil analisis tersebut berdasarkan waktu, yaitu awal kebijakan diterapkan (2010-2012) dan setelah kebijakan diberlakukan atau berjalan (2020-2022). Analisis akan dieksplorasi secara deskriptif berdasarkan hasil ketiga analisis tersebut. Berikut adalah penjelasan setiap analisisnya.

Analisis Pusat Pertumbuhan

Analisis performa pusat pertumbuhan dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi performa pusat pertumbuhan

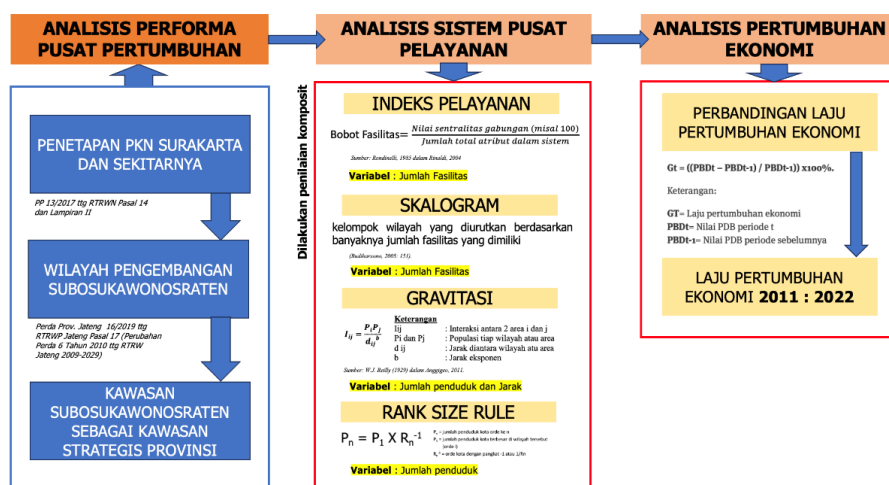
Identifikasi peran PKN Surakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan nasional di wilayah pengembangan.

b. Indeks Pusat Pelayanan

Pilih variabel pelayanan yang mencerminkan peran pusat pelayanan, seperti jumlah lembaga keuangan, pusat perbelanjaan, dan institusi pendidikan tinggi. Selain itu, hitung Indeks Pusat Pelayanan dengan bobot dan perhitungan yang sesuai untuk menghasilkan indeks pusat pelayanan.

c. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Subosukawonosraten

Analisis data pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar PKN Surakarta dan Kawasan Pengembangan Subosukawonosraten dengan melakukan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi PKN Surakarta dengan wilayah sekitarnya dan Kawasan Pengembangan Subosukawonosraten.



Gambar 1 Prosedur Analisis Pusat Pertumbuhan
(Sumber : Sintesa Tim Peneliti, 2024)

Analisis Locational Quotient (LQ)

Analisis *Locational Quotient* (LQ) bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi basis dan non-basis di wilayah Pengembangan Kawasan Nasional (PKN) Surakarta serta Kawasan Subosukawonosraten. LQ membandingkan kontribusi sektor tertentu di wilayah studi dengan kontribusi sektor wilayah yang lebih luas (Purnaditya, 2024), menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari BPS. Analisis ini dilakukan untuk periode 2010-2012 (sebelum penetapan PKN Surakarta) dan 2020-2022 (sesudahnya). Tahun 2009 dan 2023 tidak digunakan karena keterbatasan klasifikasi sektor dan ketersediaan data. Hasil analisis diharapkan menunjukkan kondisi ekonomi sektoral wilayah PKN Surakarta serta dampak kebijakan penetapan PKN pada sektor basis di daerah tersebut.

$$LQ = \frac{ps/pl}{PS/PL}$$

Ket :

LQ = Location Quotient

Ps = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal lokal.

Pl = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal lokal.

PS = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal regional.

PL = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat regional.

Syarat suatu sektor disebut basis apabila nilai $LQ \geq 1$ atau sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah dan ekspor. Sementara apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut tergolong sektor non-basis atau hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah.

Analisis Shift Share

Teori *shift-share* merupakan kerangka analisis yang sangat berguna dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah (Mustikaningrum & Widjonarko, 2018). Teori ini memecah pertumbuhan ekonomi menjadi tiga komponen penting: kompetitif, komposisi, dan efek lokasi. Berikut rumus untuk menghitung shift-share.

Rumus:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = (R_{ij} - r_{in})$$

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Ket :

E_{ij} = Output di sektor i daerah j

E_{in} = Output di sektor i nasional

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i pada daerah j

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i nasional

r_n = Laju pertumbuhan ekonomi nasional

N_{ij} = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j (Indonesia) (Regional Growth Effect)

M_{ij} = Bauran industri sektor i di daerah j (Indonesia) (Industry Mix Effect)

C_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Indonesia) (Regional Shares Effect)

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel wilayah yang diteliti Indonesia

D_{ij} = Perubahan sektor i di daerah j (Indonesia) (Total Effect)

Pertama-tama, komponen kompetitif menunjukkan sejauh mana suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dalam sektor-sektor tertentu yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan pemahaman mendalam tentang sektor mana yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Kemudian, komponen komposisi menyoroiti sejauh mana struktur ekonomi suatu wilayah memengaruhi pertumbuhannya. Analisis ini mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi tulang punggung atau basis ekonomi wilayah, serta sektor-sektor non-basis yang memberikan kontribusi tambahan namun mungkin kurang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat analisis shift-share Komponen Pertumbuhan Proporsional (*Proportional Shift*) dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (*Differential Shift*) berikut rumus untuk menghitung hasil KPP dan KPPW.

Rumus :

$$\begin{aligned} PE &= KPN + KPP + KPPW \\ &= (Y_t/Y_o - 1) + (Y_{it}/Y_{io} - Y_t/Y_o) + (y_{it}/y_{io} - Y_{it}/Y_{io}) \\ &= (R_a - 1) + (R_i - R_a) + (r_i - R_i) \end{aligned}$$

Keterangan:

PE = pertumbuhan ekonomi wilayah lokal

Y_t = indikator ekonomi wil. Nasional, akhir tahun analisis.

Y_o = indikator ekonomi wil. Nasional, awal tahun analisis.

Y_{it} = indikator ekonomi wil. Nasional sektor i , akhir tahun analisis.

Y_{io} = indikator ekonomi wil. Nasional sektor i , awal tahun analisis.

y_{it} = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i , akhir tahun analisis.

y_{io} = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i , awal tahun analisis.

Jika, KPP bernilai positif ($KPP > 0$) maka wilayah/daerah berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional bertumbuh cepat, sementara jika KPP bernilai negatif ($KPP < 0$) maka pada wilayah/daerah berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional bertumbuh lambat. Di samping itu, jika KPPW bernilai positif ($KPPW > 0$) maka sektor mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di wilayah/daerah tersebut dan tergolong daya saing tinggi, sementara jika KPPW bernilai negatif ($KPPW < 0$) menunjukkan sektor tidak mempunyai keunggulan komparatif (daya saing rendah).

Selain analisis diatas, penelitian ini juga akan menganalisis secara eksploratif untuk mengungkap sejauh mana faktor-faktor eksternal dan komponen efek lokasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah, seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, infrastruktur, atau perubahan lingkungan.

Hasil Dan Pembahasan

Analisa struktur pusat pelayanan dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas masyarakat melalui ketersediaan pelayanan sarana prasarana yang ada di dalam suatu wilayah. Dalam analisis struktur pusat pelayanan di Kawasan Subosukawonosraten tata cara menilai struktur pusat pelayanan adalah dengan menggunakan perbandingan antara sarana eksisting secara total di dalam kawasan untuk dibandingkan dengan tingkat ketersediaan sarana tersebut di masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan hal tersebut maka akan dapat diketahui wilayah Kabupaten/kota yang paling berperan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan pusat-pusat kegiatan dan daerah-daerah pendukung kawasan. Analisis yang digunakan dalam menentukan pusat pelayanan adalah analisis skalogram guttman dan indeks sentralitas.

Analisis Skalogram adalah alat untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki. Dengan alat ini, bisa ditentukan hierarki pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan di suatu wilayah. Wilayah dengan fasilitas lengkap berfungsi sebagai pusat pelayanan, sementara wilayah dengan fasilitas terbatas menjadi daerah belakang (*hinterland*).

Di sisi lain, matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari analisis fungsi wilayah yang mempelajari fungsi-fungsi pelayanan di Kawasan Subosukawonosraten. Indeks ini membantu mengetahui struktur pusat-pusat pelayanan, jumlah fungsi yang ada, jenis fungsi, jumlah penduduk yang dilayani, dan frekuensi suatu fungsi di wilayah tersebut. Dalam analisis ini, akan diidentifikasi dan dianalisis kondisi fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan perkantoran di Kawasan Subosukawonosraten.

a. Analisis Skalogram Guttman

Analisis Skalogram Guttman yang dilakukan di Kawasan Subosukawonosraten terdiri atas 7 Kabupaten/Kota dengan persebaran tiap jumlah fasilitasnya berbeda-beda. Dalam analisis ini, fasilitas yang digunakan ada 29 fasilitas diantaranya adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan jasa, fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran. Tingkat ketersediaan pelayanan diukur dengan jumlah eksisting unit pelayanan yang tersedia. Skala Guttman yaitu skala yang mengidentifikasi ketersediaan pelayanan dalam bentuk nominal yaitu 1 = Ada (tersedia) dan 0 = Tidak Ada (tidak tersedia). Analisis skalogram guttman yang dilakukan adalah menggunakan data proyeksi fasilitas.

b. Analisis Indeks Sentralitas

Analisis indeks sentralitas yang dilakukan di Kawasan Subosukawonosraten. Dalam analisis ini, fasilitas yang digunakan ada ada 29 fasilitas diantaranya adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan jasa, fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran. Nilai indeks sentralitas diketahui dengan melihat besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.

c. Analisis Penduduk

Analisa struktur pusat pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan kependudukan di Kawasan Subosukawonosraten. Penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan tata ruang, hal ini karena perencanaan sebuah ruang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan ruang masyarakat baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta mendukung aktifitas perekonomian.

Tabel . 1 Rank Size di Kawasan Subosukawonosraten

No	Kab/Kota	Log Jumlah Penduduk (Jiwa)	Log Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Total	Rank
1.	Kota Surakarta	5,72	3,66	9,38	Rendah
2.	Kabupaten Boyolali	6,03	5,00	11,03	Sedang
3.	Kabupaten Sukoharjo	5,96	4,69	10,65	Tinggi
4.	Kabupaten Karanganyar	5,97	4,89	10,86	Tinggi
5.	Kabupaten Wonogiri	6,02	5,25	11,27	Tinggi
6.	Kabupaten Sragen	5,99	4,97	10,96	Rendah
7.	Kabupaten Klaten	6,10	4,82	10,92	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Berdasarkan analisis Skalogram, Penduduk, dan Arah Sistem Pusat Pelayanan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, diperoleh sistem pusat pelayanan di Kawasan Subosukawonosraten. Skoring dilakukan terhadap indikator dari ketiga analisis tersebut dengan nilai 1 (Rendah), 2 (Sedang), dan 3 (Tinggi).

a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Wilayah ini berfungsi melayani kegiatan utama WP dan berlokasi di Kabupaten Klaten dengan Hirarki I. Klaten memiliki sarana penunjang yang cukup lengkap.

Fungsi utamanya mencakup transportasi, perekonomian, perdagangan dan jasa, kesehatan, serta permukiman dengan kepadatan tinggi.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Berfungsi sebagai penunjang perkotaan, ditetapkan sebagai pusat kegiatan lingkungan yang mengaglomerasi kegiatan pendukung, termasuk distribusi bahan pokok dan permukiman antar kawasan. Sub pusat berada di Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri dengan Hirarki II berdasarkan analisis Guttman.

c. Pelayanan Lingkungan

Melayani skala wilayah kelurahan dengan lokasi di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Lokasi dipilih berdasarkan potensi eksisting dan mencakup pelayanan tingkat kelurahan, memiliki Hirarki III dalam analisis skalogram.

Tabel 2. Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Subosukawonosraten

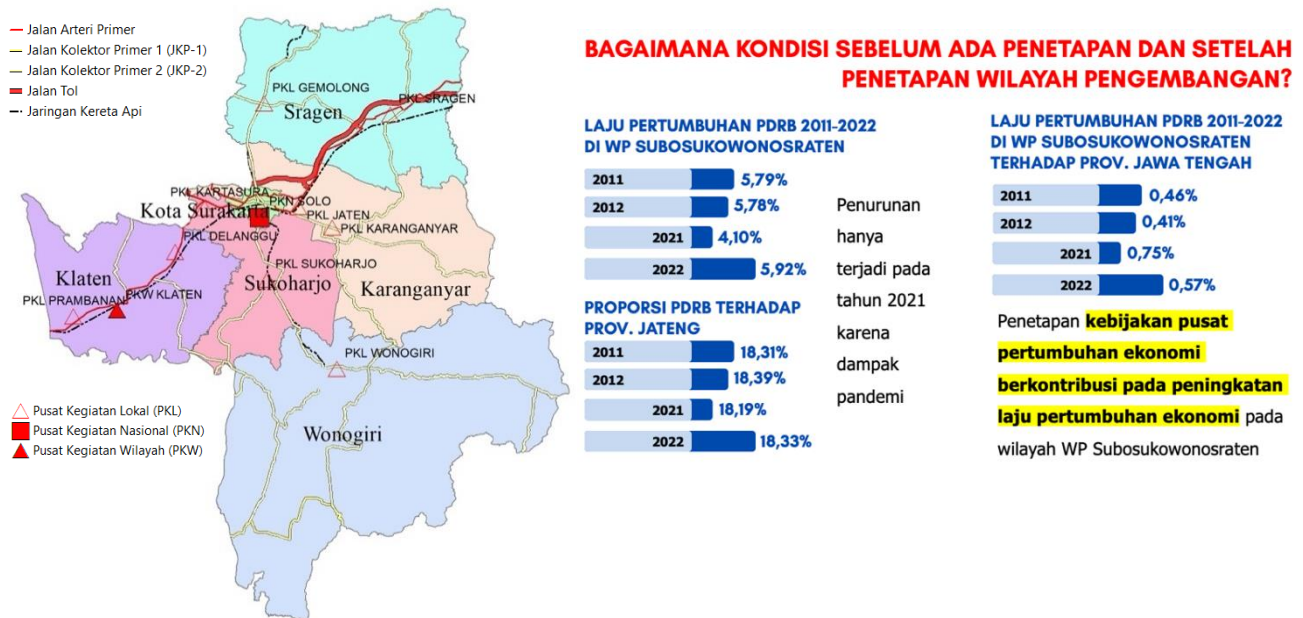
No	Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan		Skalogram		Gravitasi		Rank Size		Total Skor	Range Akhir	Hirarki
		Range	Skor	Range	Skor	Range	Skor	Range	Skor			
1	Kota Surakarta	Sedang	2	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	7	Rendah	III
2	Kab. Boyolali	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1	Sedang	2	7	Rendah	III
3	Kab. Sukoharjo	Rendah	1	Sedang	2	Tinggi	3	Tinggi	3	9	Sedang	II
4	Kab. Karanganyar	Rendah	1	Sedang	2	Tinggi	3	Tinggi	3	9	Sedang	II
5	Kab. Wonogiri	Sedang	2	Tinggi	3	Rendah	1	Tinggi	3	9	Sedang	II
6	Kab. Sragen	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1	6	Rendah	III
7	Kab. Klaten	Tinggi	3	Tinggi	3	Sedang	2	Tinggi	3	11	Tinggi	I

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Penentuan hierarki sistem perkotaan nasional yang belum terealisasi dapat diatribusikan kepada berbagai faktor. Salah satunya adalah kecenderungan penempatan pusat kegiatan nasional di wilayah kota daripada kawasan perkotaan. Hal ini mengakibatkan wilayah tersebut memiliki luas yang lebih kecil, meskipun sarana dan prasarana yang dimilikinya mungkin lengkap, jumlahnya cenderung lebih sedikit, dan kepadatan penduduknya tinggi.

Sistem perkotaan nasional sebaiknya diwujudkan dalam bentuk *Functional Urban Area* (FUA), di mana kawasan perkotaan dan sekitarnya saling mendukung dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Penting juga untuk mempertimbangkan peran infrastruktur seperti jalan, terminal, pelabuhan, dan bandara, karena hal ini akan berdampak pada fungsi wilayah.

Pada Kawasan Subosukawonosraten, meskipun Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kota Surakarta, analisis menunjukkan bahwa hierarkinya hanya mencapai tingkat tiga. Saat ini, performa terbaik dapat diidentifikasi pada Kabupaten Klaten.



Gambar 2. Sistem Pusat Pelayanan dan Implikasi terhadap Laju Pertumbuhan PDRB 2011-2022 di Kawasan Subosukawonosraten
 Sumber: Hasil Pengolahan Tim, 2023

Analisis LQ

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada analisis LQ ini akan melihat sektor basis apa yang ada di setiap wilayah pada periode awal dan akhir masa implementasi kebijakan berjalan. Kebijakan yang dimaksud adalah arah pengembangan PKN Surakarta dan sekitarnya serta Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten sebagaimana tercantum pada RTRW Nasional 2008-2028 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029. Selain itu pada analisis ini juga akan menganalisis apakah terjadi perubahan sektor basis semenjak ditetapkannya PKN Surakarta dan sekitarnya terhadap WP Subosukawonosraten sebagaimana tertuang dalam PP No 13 Tahun 2017 (Perubahan PP No.26 Tahun 2008) dan Perda Jateng No 16 Tahun 2019 (Perubahan Perda Jateng No. 6 Tahun 2010). Analisis pada bagian ini menggunakan data PDRB per kapita pada setiap wilayah studi.

a. Sektor basis Tahun 2010-2012

Analisis LQ pada awal implementasi kebijakan PKN Surakarta dan WP Subosukawonosraten (2010-2012) menunjukkan bahwa sektor basis di seluruh wilayah WP adalah Sektor Jasa dan Kegiatan Sosial, dengan nilai LQ merata antara 1,01 hingga 1,29. Sektor dominan lainnya yang tersebar di lima dari enam kabupaten/kota adalah Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Keuangan, dan Sektor Jasa Pendidikan. Kota Surakarta mencatat LQ tertinggi untuk Sektor Perdagangan (1,63), sedangkan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri memiliki LQ

tertinggi pada Sektor Jasa Keuangan (1,41) dan Jasa Pendidikan (1,48) secara berturut-turut. Dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Tengah, hanya Sektor Perdagangan yang memiliki kesamaan dominasi.

Tabel 3. Sektor basis di PKN Surakarta dan WP Subosukawonosraten 2010-2012

Kategori	Kabupaten/Kota							
	Surakarta	Boyolali	Sukoharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten	Jateng
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	1,60	0,64	0,97	2,30	1,26	0,82	1,12
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	2,01	0,23	0,60	1,60	1,24	1,42	0,19
C. Industri Pengolahan	0,22	0,74	1,08	1,27	0,40	0,84	0,90	1,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	0,22	1,37	1,61	0,70	1,59	1,68	0,10
E. Peng. Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,55	0,91	0,54	1,12	0,98	1,07	0,68	0,98
F. Konstruksi	2,70	0,66	0,65	0,62	0,61	0,69	0,64	1,07
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Kendaraan	1,63	1,03	1,35	0,83	1,15	1,49	1,40	1,05
H. Transportasi dan Pergudangan	0,87	1,40	1,08	0,90	2,00	0,87	0,76	0,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	0,95	1,25	1,13	0,81	1,01	1,32	1,00
J. Informasi dan Komunikasi	3,41	0,74	1,19	0,38	0,24	0,37	1,14	0,86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	0,84	1,41	1,28	1,02	1,01	1,21	0,75
L. Real Estate	2,48	0,69	1,37	1,07	0,45	0,54	0,84	0,57
M,N. Jasa Perusahaan	2,23	1,01	1,09	0,98	1,10	1,27	0,86	0,20
O. Admin. Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	2,03	1,01	0,85	0,78	1,03	0,86	0,95	0,80
P. Jasa Pendidikan	1,31	1,35	0,93	1,06	1,48	1,10	1,66	0,98
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,14	1,10	1,01	1,14	1,01	1,31	0,68
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,67	1,20	0,95	0,97	1,20	1,12	1,17	0,99

Sumber : Hasil Pengolahan, 2023

Analisis menunjukkan Kota Surakarta sebagai wilayah dominan secara ekonomi basis ($LQ \geq 1$) dengan 12 dari 17 sektor berstatus sektor basis dan nilai LQ lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di WP Subosukawonosraten. Hal ini sejalan dengan kebijakan mendorong Surakarta sebagai pusat perkotaan dan kegiatan skala nasional. Namun, sektor basis Surakarta masih didominasi oleh jasa, sementara sektor industri tidak menjadi sektor basis ($LQ 0,22$). Sebaliknya, sektor industri dilayani oleh Kabupaten Sukoharjo ($LQ 1,08$) dan Karanganyar ($LQ 1,27$).

b. Sektor basis Tahun 2020-2022

Pada periode 2020-2022, sektor basis di PKN Surakarta dan WP Subosukawonosraten hampir sama dengan periode 2010-2012, dengan Sektor Perdagangan tetap dominan ($LQ \geq 1$) di hampir semua wilayah kecuali Kabupaten Boyolali (0,94), yang digantikan oleh Kabupaten Karanganyar (1,33). Kota Surakarta memiliki nilai basis tertinggi di sektor ini (1,54) sesuai arah kebijakannya sebagai

pusat perkotaan. Sektor dengan keterwakilan paling rendah adalah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, hanya hadir di Kota Surakarta (2,20) dan Kabupaten Wonogiri (1,05).

Tabel 4. Sektor basis di PKN Surakarta dan Kawasan Subosukawonosraten 2020-2022

Kategori	Kabupaten/Kota							
	Surakarta	Boyolali	Sukoharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten	Jateng
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	1,60	0,62	0,78	2,27	1,09	0,83	0,97
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	1,63	0,15	0,21	1,26	1,06	1,18	0,28
C. Industri Pengolahan	0,23	0,90	1,13	1,15	0,50	1,07	1,03	1,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,04	0,20	1,10	1,27	0,75	1,36	1,66	0,11
E. Peng. Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,20	0,73	0,53	0,58	1,05	0,96	0,73	0,79
F. Konstruksi	2,36	0,63	0,60	0,61	0,69	0,62	0,64	1,02
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Kendaraan	1,54	0,94	1,23	1,33	1,22	1,39	1,17	1,08
H. Transportasi dan Pergudangan	0,52	1,21	1,05	1,08	2,03	0,81	0,70	0,75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	0,86	1,13	1,10	0,78	1,03	1,20	1,13
J. Informasi dan Komunikasi	3,05	0,76	1,33	0,69	0,28	0,38	0,90	0,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	0,81	1,26	1,36	1,11	0,99	1,23	0,63
L. Real Estate	2,20	0,67	1,32	1,22	0,43	0,53	0,78	0,62
M,N. Jasa Perusahaan	1,90	0,99	1,06	0,87	1,12	1,18	0,87	0,20
O. Admin. Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	1,97	0,91	0,80	1,01	1,05	0,79	0,89	0,72
P. Jasa Pendidikan	1,05	1,39	0,92	0,79	1,54	1,05	1,65	1,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,10	1,10	0,82	1,19	0,89	1,35	0,66
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,52	1,07	0,91	0,84	1,23	1,05	1,14	0,87

Sumber : Hasil Pengolahan, 2023

Berbeda dari 10 tahun sebelumnya, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tidak lagi mencakup seluruh wilayah di PKN Surakarta dan WP Subosukawonosraten, hanya menjadi basis di 5 dari 7 wilayah, kecuali Kabupaten Karanganyar (0,88) dan Sragen (0,89). Kota Surakarta tetap dominan dengan 12 sektor sebagai basis, terutama Sektor Informasi dan Komunikasi (LQ 3,05) dan Sektor Konstruksi (LQ 2,36).

c. Perbandingan Sektor Basis Tahun 2010-2012 dengan Tahun 2020-2022

Perbandingan LQ antara 2010-2012 dan 2020-2022 menunjukkan perubahan pada 16 sektor (13,4%) di wilayah tersebut. Kabupaten Karanganyar mengalami

perubahan terbanyak (6 sektor), disusul Sragen (4 sektor), Boyolali (3 sektor), Klaten (2 sektor), dan Wonogiri (1 sektor). Kota Surakarta tetap stabil tanpa perubahan sektor. Sektor Industri Pengolahan bertambah menjadi sektor basis di Sragen dan Klaten, sementara Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menurun di Karanganyar dan Sragen.

Tabel 5. Sektor perbandingan sektor basis Tahun 2010-2012 dengan 2020-2022

Kategori	Perubahan Sektor Basis							
	Surakarta	Boyolali	Sukoharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten	Jateng
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	nb	b	nb	nb	b	b	nb	NB
B. Pertambangan dan Penggalian	nb	b	nb	nb	b	b	b	nb
C. Industri Pengolahan	nb	nb	b	b	nb	B	B	b
D. Pengadaan Listrik dan Gas	b	nb	b	b	nb	b	b	nb
E. Peng. Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	b	nb	nb	NB	B	NB	nb	nb
F. Konstruksi	b	nb	nb	nb	nb	nb	nb	b
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Kendaraan	b	NB	b	B	b	b	b	b
H. Transportasi dan Pergudangan	nb	B	b	B	b	nb	nb	nb
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	b	nb	b	b	nb	b	b	b
J. Informasi dan Komunikasi	b	nb	b	nb	nb	nb	NB	nb
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	b	nb	b	b	B	NB	b	nb
L. Real Estate	b	nb	b	b	nb	nb	nb	nb
M,N. Jasa Perusahaan	b	NB	b	nb	b	b	nb	nb
O. Admin. Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	b	NB	nb	B	b	nb	nb	nb
P. Jasa Pendidikan	b	b	nb	NB	b	b	b	B
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	b	b	b	NB	b	NB	B	nb
R,S,T,U. Jasa Lainnya	nb	b	nb	nb	b	b	b	nb
Keterangan	b	Basis			B	Non Basis to Basis		
	nb	Non Basis			NB	Basis	to	Non-Basis

Sumber : Hasil Pengolahan, 2023

Apabila merujuk PP No 13 Tahun 2017 (Perubahan PP No.26 Tahun 2008) tentang RTRW Nasional yang dibahas secara detail dan selaras pada Perda Jateng No 16 Tahun 2019 (Perubahan Perda Jateng No. 6 Tahun 2010) tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil perbandingan tersebut didapatkan beberapa telaah sebagai berikut:

- Kota Surakarta berhasil menjalankan fungsi kotanya dengan banyak sektor jasa, tapi sektor industri yang didorong tidak menjadi sektor basis. Ini artinya, tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai hingga 2022.
- Sektor industri pengolahan mengalami ekspansi ke Kabupaten Sragen dan Klaten, yang sebelumnya hanya basis di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini menunjukkan perkembangan kawasan industri meskipun tidak langsung di pusat Kota Surakarta dan sejalan dengan kebijakan yang mengarahkan kawasan tersebut sebagai sektor unggulan industri.
- Sektor perdagangan, pertanian, dan pertambangan mengalami stagnasi, dengan hanya pergeseran lokasi dan tak ada perubahan signifikan. Misalnya, perdagangan di Karanganyar meningkat, sedangkan di Boyolali menurun.
- Meskipun ada arah untuk mengembangkan sektor jasa dan pariwisata, sektor jasa justru menurun dengan 5 dari 16 sektor ekonomi basis yang berubah ke non-basis dalam satu dekade terakhir. Ini menunjukkan perkembangan belum sesuai ekspektasi dalam rencana RTRW.
- Kabupaten Boyolali dan Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), namun keduanya mengalami stagnasi dan penurunan sektor. Boyolali kehilangan tiga sektor basis, sementara Klaten menambah sektor industri tapi kehilangan basis di informasi dan komunikasi.
- Di luar arahan kebijakan, Kabupaten Wonogiri justru mengalami perkembangan, dari 10 sektor pada 2010-2012 ke 11 sektor pada 2020-2022, termasuk penambahan sektor Pengelolaan Air dan Persampahan.

Analisis Shiftshare

Berikut adalah tabel perbandingan untuk sektor ekonomi di tingkat kabupaten dan kota antara tahun 2012 dan 2022 menggunakan analisis shift share:

Tabel 6. Sektor perbandingan KPP dan KPPW Tahun 2012 dengan 2022

No	Sektor	Tahun 2012	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan lambat, beberapa wilayah tidak berdaya saing	Perbaikan pertumbuhan dan peningkatan daya saing, terutama di beberapa KPP
2	Pertambangan dan Penggalian	Tumbuh lambat pada umumnya, beberapa wilayah meningkatkan daya saing	Pertumbuhan lambat secara umum, beberapa KPP mengalami penurunan daya saing
3	Industri Pengolahan	Pertumbuhan lambat di sebagian besar KPP	Pertumbuhan lambat secara umum, beberapa KPP menunjukkan peningkatan daya saing

No	Sektor	Tahun 2012	Tahun 2022
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP	Pertumbuhan cepat tetapi daya saing mengalami penurunan di beberapa wilayah
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	Pertumbuhan lambat, beberapa KPP berdaya saing	Tren pertumbuhan masih lambat, pergeseran daya saing di beberapa wilayah
6	Konstruksi	Pertumbuhan lambat, sebagian besar KPP tidak berdaya saing	Pertumbuhan lambat secara umum, beberapa wilayah menunjukkan peningkatan daya saing
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan lambat, sebagian besar KPP tidak berdaya saing	Tetap tumbuh lambat pada tahun 2022, beberapa KPP menunjukkan peningkatan daya saing
8	Transportasi dan Pergudangan	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP	Pertumbuhan cepat, namun daya saing mengalami penurunan di beberapa wilayah
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP	Pertumbuhan cepat secara umum, beberapa wilayah menunjukkan penurunan daya saing
10	Informasi dan Komunikasi	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP pada tahun 2012 dan 2022	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pertumbuhan lambat, sebagian besar KPP tidak berdaya saing	Tetap tumbuh lambat pada tahun 2022, beberapa KPP menunjukkan peningkatan daya saing
12	Real Estate	Tumbuh cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP pada tahun 2012 dan 2022	-
13	Jasa Perusahaan	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP pada tahun 2012 dan 2022	-

No	Sektor	Tahun 2012	Tahun 2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pertumbuhan lambat, beberapa KPP berdaya saing	Pertumbuhan lambat pada tahun 2022, beberapa KPP tetap berdaya saing
15	Jasa Pendidikan	Pertumbuhan lambat, beberapa KPP berdaya saing	Pertumbuhan lambat pada tahun 2022, beberapa KPP tetap berdaya saing
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pertumbuhan cepat dengan daya saing baik di sebagian besar KPP pada tahun 2012 dan 2022	-
17	Jasa Lainnya	Keragaman pertumbuhan, beberapa KPP tumbuh lambat dan beberapa KPP tumbuh cepat pada tahun 2012 dan 2022	-

Sumber : Hasil Pengolahan, 2023

Tabel gabungan data KPP-KPPW tahun 2012 dan 2022 memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Pada 2012, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lambat, tetapi meningkat signifikan di 2022 berkat teknologi dan kebijakan baru. Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalan menurun akibat fluktuasi harga dan regulasi. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan meskipun pertumbuhannya lambat.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penurunan daya saing pada 2022 karena regulasi dan infrastruktur. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tetap tumbuh, tetapi daya saing menurun di beberapa daerah. Sektor Informasi dan Komunikasi terus tumbuh pesat, sedangkan Jasa Keuangan dan Asuransi meningkat daya saingnya pada 2022 berkat digitalisasi. Sektor Konstruksi dan Perdagangan menghadapi tantangan namun menunjukkan peningkatan di beberapa wilayah. Sektor Pengadaan Air dan pengelolaan limbah masih lambat, menunjukkan tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulannya, meski beberapa sektor mengalami pertumbuhan, tantangan tetap ada. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor ini demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian ini, berhasil diidentifikasi dampak dari penetapan PKN Surakarta dan sekitarnya terhadap kawasan pengembangan Subosukawonosraten dengan pendekatan analisis Shift Share. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan PKN memberikan variasi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi

daerah, termasuk perubahan dalam sektor-sektor tertentu yang lebih terdampak dibandingkan yang lain. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengembangan wilayah yang dipengaruhi oleh kebijakan pusat, serta peran penting kawasan Surakarta sebagai penyangga dalam pengembangan wilayah terdekat. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

Sebagai rekomendasi, pengambil kebijakan disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam merancang kebijakan pengembangan. Ini termasuk pemetaan potensi dan kebutuhan sektor-sektor yang terdampak, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Penelitian selanjutnya juga perlu fokus pada analisis jangka panjang yang memeriksa dampak berkelanjutan dari penetapan PKN serta keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bisa tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Angelina Laksmiati Rachma Purnaditya. (2024). Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Hortikultura di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.2.96-103>
- Athukorala, P. chandra, & Narayanan, S. (2018). Economic corridors and regional development: The Malaysian experience. *World Development*, 106, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.009>
- de Almeida, S. J., Esperidião, F., & de Moura, F. R. (2024). The impact of institutions on economic growth: Evidence for advanced economies and Latin America and the Caribbean using a panel VAR approach. *International Economics*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100480>
- Du, Y., Cardoso, R. V., & Rocco, R. (2024). Towards coordination of spatial relations: Understanding Chinese mega-regionalization from a secondary city perspective. *Cities*, 154. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105375>
- Giannakis, E., Bruggeman, A., & Mamuneas, T. P. (2024). Regional economic resilience, productivity growth and sectoral interconnectedness. *Papers in Regional Science*, 103(2). <https://doi.org/10.1016/j.pirs.2024.100010>
- Guo, L., Tang, M., Wu, Y., Bao, S., & Wu, Q. (2025). Government-led regional integration and economic growth: Evidence from a quasi-natural experiment of urban agglomeration development planning policies in China. *Cities*, 156, 105482. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105482>
- Li, Y., Liao, C., Li, X., & Guo, R. (2024). Understanding regional structure through spatial networks: A simulation optimization framework for exploring balanced development. *Habitat International*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103155>

- Li, Y., Wang, Z., Lin, Z., & Gao, Y. (2025). Revisiting regional governance and regional development: Measurements, linkages and coupling effect. *World Development*, 185. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106816>
- Liu, Y., Yang, M., & Cui, J. (2024). Urbanization, economic agglomeration and economic growth. *Heliyon*, 10(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23772>
- Mustikaningrum, I. (2018). *R u a n g Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Untuk Mendukung Perekonomian Wilayah Kabupaten Indramayu Flagship Commodities of Food Crops to Support the Regional Economic in Kabupaten Indramayu*. 4(1), 57–65. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/>
- Setyaningrum, S., & Hartono, S. (2011). *Analisis Sektor Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/51648>
- Shaban, A. (2023). Regional economic growth and development in the Global South. In *Regional Science Policy and Practice* (Vol. 15, Issue 5, pp. 934–938). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12684>
- Tiebout, C. M. (1956). *Exports and Regional Economic Growth*. *Journal of Political Economy*, 64(2), 160–164. <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>
- Zhao, Y., Li, J., Liu, K., & Shang, C. (2024). Impact of urban-rural development and its industrial elements on regional economic growth: An analysis based on provincial panel data in China. *Heliyon*, 10(16). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36221>